

**IMPLEMENTASI TATA KERJA ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALANGKARAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Erlangga Yudha Pratama

NPP. 30.0921

Asdaf Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: erlangga039@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the implementation of the organizational work policy of the Palangkaraya City Regional Disaster Management Agency. **Purpose:** The purpose of this research is to understand and describe the implementation of the organizational work policy of the Palangkaraya City Regional Disaster Management Agency. **Method:** This research utilizes a qualitative descriptive method and analysis based on the implementation theory by Edward III. Data collection techniques involve conducting interviews with three informants and gathering relevant documentation. **Result:** The findings obtained in this study regarding the implementation of the organizational work system in the Palangkaraya City Regional Disaster Management Agency (BPBD) can be summarized as follows: in terms of disposition, the issues and prospects have been running well. However, there are still shortcomings in the dimensions of resources, communication, and bureaucratic structure. **Conclusion:** The implementation of the organizational work system in the Palangkaraya City Regional Disaster Management Agency (BPBD) based on the dimensions used for analysis is generally good. However, there are still some shortcomings within it. Therefore, the implementation of the BPBD work system in Palangkaraya has not yet reached its optimal level. **Keywords:** Implementation; BPBD; Palangkaraya City

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada bagaimana implementasi kebijakan tata kerja organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan tata kerja organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan analisis terhadap implementasi menurut Teori Edward III. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (3 informan) dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu implementasi tata kerja organisasi BPBD kota Palangkaraya dari lima dimensi yang telah digunakan dapat disimpulkan bahwa pada dimensi disposisi, masalah dan prospek sudah berjalan baik, masalah dan prospek sudah berjalan baik namun masih terdapat kekurangan pada dimensi sumberdaya, komunikasi dan struktur birokrasi. **Kesimpulan:** Implementasi tata kerja organisasi BPBD Kota Palangkaraya berdasarkan

dimensi yang digunakan untuk analisis sudah cukup baik namun masih terdapat beberapa kekurangan di dalamnya, dengan demikian implementasi tata kerja BPBD kota Palangkaraya belum berjalan dengan optimal.

Kata kunci: Implementasi; BPBD; Kota Palangkaraya

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Implementasi BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) di Kota Palangkaraya sangat penting mengingat meningkatnya jumlah bencana alam, seperti kebakaran hutan dan banjir, yang melanda wilayah Kalimantan, khususnya Kota Palangkaraya. Kekayaan sumber daya alam di daerah tersebut telah menarik perhatian oknum yang tidak bertanggung jawab dan kelompok tertentu, yang akibatnya mengakibatkan degradasi lingkungan dan kerentanan masyarakat.

Meskipun Palangkaraya merupakan daerah yang relatif aman dari bencana alam berdasarkan topografi dan letak geografisnya, namun perkembangan ekonomi, pertumbuhan penduduk, dan stagnasi lingkungan telah menyebabkan berbagai tantangan lingkungan di kota ini.

Berdasarkan pernyataan dari Kepala BPBD Kota Palangkaraya, Ibu Emi Abriyani, SE, M.Si, dan Sekretaris BPBD Kota Palangkaraya, Ibu Anna Menur Ambar Sari, beberapa faktor penyebab hambatan dalam penanggulangan bencana di BPBD Kota Palangkaraya antara lain kurangnya optimalisasi pegawai dalam pengoperasian peralatan penanggulangan bencana, kurangnya pemahaman dalam pengelolaan kebijakan penanggulangan bencana, dan kurangnya kelengkapan serta optimalisasi peralatan BPBD Kota Palangkaraya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Palangkaraya Nomor 60 Tahun 2019 yang mengatur mengenai BPBD Kota Palangkaraya, BPBD Kota Palangkaraya bertanggung jawab dalam penyelenggaraan, penyusunan kebijakan, dan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.

Dalam menghadapi bencana, BPBD bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial untuk memberikan pelayanan, bantuan, dan pembinaan kepada masyarakat terkait penanggulangan dampak bencana. Penting untuk memperkuat upaya pencegahan dan peningkatan keterampilan serta manajemen yang handal dalam menghadapi bencana, dengan melibatkan Pemerintah Kota Palangkaraya dan seluruh lapisan masyarakat guna meningkatkan pelayanan publik dan kinerja pemerintah yang diakui oleh masyarakat.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Salah satu hambatan utama dalam penanggulangan bencana di BPBD Kota Palangkaraya adalah kurangnya optimalisasi pegawai dalam pengoperasian peralatan penanggulangan bencana. Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi tindakan penanggulangan yang dilakukan. Selain itu, peralatan yang digunakan juga masih kurang optimal dan memadai, sehingga dapat membatasi kemampuan BPBD dalam merespons dan mengatasi bencana dengan cepat dan efisien.

Kemudian kurangnya pemahaman dalam pengelolaan kebijakan penanggulangan bencana. Hal ini mencakup pemahaman yang kurang dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penanggulangan bencana. Kurangnya pemahaman ini dapat mempengaruhi efektivitas strategi penanggulangan yang diimplementasikan oleh BPBD Kota Palangkaraya dan kurangnya kelengkapan dan optimalisasi peralatan BPBD Kota Palangkaraya. Peralatan yang tidak memadai dapat membatasi kemampuan BPBD dalam merespons dan mengatasi bencana dengan efektif. Selain itu, kurangnya pemeliharaan dan perawatan peralatan juga dapat mempengaruhi kesiapan dan kinerja BPBD dalam situasi darurat.

Meskipun Palangkaraya memiliki topografi dan letak geografis yang relatif aman dari bencana alam, namun adanya pertumbuhan ekonomi, penambahan penduduk, dan stagnasi lingkungan telah menyebabkan peningkatan jumlah bencana dan kerentanan masyarakat. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan wilayah dengan kesiapan dan kapasitas BPBD dalam menghadapi bencana yang semakin meningkat.

Kesenjangan masalah ini perlu ditangani dengan upaya yang terkoordinasi antara BPBD, pemerintah daerah, dan masyarakat. Diperlukan optimalisasi sumber daya manusia dan peralatan, peningkatan pemahaman dalam pengelolaan kebijakan penanggulangan bencana, serta perencanaan strategis untuk meminimalkan risiko bencana. Selain itu, perlu juga meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bencana dan upaya penanggulangannya untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan resiliensi masyarakat dalam menghadapi bencana.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks Implementasi maupun konteks Tata Kerja Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Penelitian Nendy Mulyawan Nugrahanto *Implementasi Perencanaan Strategis BPBD Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Surakarta*, menemukan bahwa untuk menanggulangi Banjir di Kota Surakarta pemerintah mengajak banyak pihak untuk ikut serta berpartisipasi layaknya sektor swasta serta masyarakat supaya mampu berkolaborasi mengatasi bencana banjir dengan mengimplementasikan tupoksi BPBD Kota Surakarta. Penelitian 2. Amalina Dyah Purwoningrum *Implementasi Perda No 3 Tahun 2011 Tentang Organisasi serta Tata Kerja BPBD Kabupaten Banjarnegara Dalam Menanggulangi Bencana Tahun 2014* menemukan bahwa dalam tahapan pelaksanaan implementasi Penanggulangan bencana di Banjarnegara saat itu sudah dilaksanakan oleh banyak kalangan. Tiap kalangan sudah diberi tugasnya selaras dengan keunggulan yang dimiliki. Dalam pengimplementasiannya mampu terliwat lewat dua dimensi yakni Dimensi Pendorong serta Dimensi Konteks. Pada penelitian ini, dua dimensi tersebut mengacu pada bagaimana implementasi pemerintah Banjarnegara dalam menerapkan program tersebut. Penelitian 3. Hendrik Kristian Rumaseuw “*Implementasi Kebijakan Mitigasi Oleh BPBD Bagi Masyarakat Terdampak Banjir Di Kabupaten Supiori Provinsi Papua*” berfokus pada memberi pemahaman bagi masyarakat di Kabupaten Supiori Provinsi Papua tentang pencegahan bencana banjir sebab kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat terkait dampak bencana tersebut. BPBD memainkan peran krusial dalam upaya penanggulangan bencana di daerah tersebut.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Implementasi dalam Tata Kerja Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya di mana penelitian ini memakai teori implementasi George C. Edward sedangkan penelitian sebelumnya memakai teori proses kolaborasi antar organisasi oleh Huxham serta Siv Vangen dan analisis teori implementasi kebijakan Van Meter Horn.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan tata kerja organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Palangkaraya.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menganalisis data menurut teori Sugiyono (dalam Sugiyono 2017) yakni melalui reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing).

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 3 orang informan yang terdiri dari Kepala BPBD Kota Palangkaraya, Sekretaris BPBD Kota Palangkaraya, Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan dan Masyarakat Kota Palangkaraya dan Dokumentasi. Adapun analisisnya menggunakan teori implementasi yang digagas oleh Edward III sebab teori ini memberi gambaran yang jelas mengenai lima variabel maupun dimensi yang terkait erat dengan tata kerja serta organisasi yang relevan dengan topik penulisan. Dimensi-dimensi tersebut ialah komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, masalah dan prospek.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis implementasi tata kerja organisasi badan penanggulangan bencana daerah kota palangkaraya menggunakan pendapat dari Edward III yang memberi gambaran implementasi melalui dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, masalah dan prospek. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Sumber Daya

Tidak peduli seberapa jelas serta konsisten implementasi program, serta seberapa akurat komunikasi yang disampaikan, akan menjadi masalah jika personel yang punya tanggung jawab untuk menjalankan program kurang punya sumber daya untuk menjalankan tugasnya. Sumber daya yang diperlukan termasuk jumlah staf yang cukup, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan serta memadai untuk mengimplementasikan kebijakan, pemenuhan sumber daya yang terkait dengan pelaksanaan program, kewenangan yang memastikan program dapat diarahkan sesuai dengan harapan, serta adanya fasilitas pendukung layaknya dana serta sarana prasarana untuk menjalankan giat program.

Salah satu sumber daya yang paling esensial dalam mengimplementasikan kebijakan adalah staf. Dalam sebuah era di mana "pemerintah besar" berada dalam serangan dari semua arah, hal ini mungkin tampak mengejutkan untuk belajar bahwa sebuah sumber utama kegagalan implementasi adalah staf yang tidak cukup. Meskipun sekitar lima juta personel militer dan sipil bekerja untuk pemerintah federal dan hampir tiga belas juta lebih bekerja untuk pemerintah negara bagian dan daerah, masih terlalu sedikit orang dengan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan secara efektif dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan.

Informasi merupakan sumber daya esensial kedua dalam implementasi kebijakan. Informasi ini datang dalam dua bentuk. Pertama, informasi tentang cara melakukan sebuah kebijakan. Implementator perlu tahu apa yang harus dilakukan ketika mereka diberikan petunjuk untuk bertindak. Bentuk informasi esensial kedua adalah data dalam bentuk peraturan pemerintah. Para implementator harus tahu apakah orang lain yang terlibat dalam mengimplementasikan kebijakan telah melengkapi undang-undang yang diperlukan sebagai dasar legitimasi.

Sumber daya lain yang penting dalam implementasi adalah kewenangan (otoritas). Kewenangan ini bervariasi dari program ke program dan dapat mengambil berbagai bentuk, seperti hak untuk mengeluarkan jaminan, membawa kasus ke pengadilan, mengeluarkan perintah kepada pejabat lain, menarik dana dari program, dan bantuan teknis dalam yurisdiksi pemerintah tingkat lebih rendah. Kebijakan memerlukan pengawasan atau peraturan pemerintah dari sektor publik atau swasta, sehingga kewenangan merupakan faktor yang krusial.

Dalam implementasi kebijakan, sumber daya yang mencakup staf yang cukup, informasi yang akurat, dan kewenangan yang jelas sangat penting. Kekurangan staf yang berkualitas dapat menjadi hambatan dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan. Informasi yang baik dan komunikasi yang efektif memainkan peran penting dalam menopang implementasi kebijakan. Selain itu, kewenangan yang tepat dan terarah membantu memastikan bahwa program dijalankan sesuai dengan yang diharapkan. Semua sumber daya ini perlu dikelola dengan baik agar implementasi kebijakan dapat berjalan lancar dan efisien.

3.2. Struktur Organisasi

Membicarakan lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan kebijakan tidak dapat dipisahkan dari struktur birokrasi. Faktor-faktor seperti kemampuan dan jumlah staf, tingkat pengawasan hierarki, dukungan politik, vitalitas organisasi, dan tingkat komunikasi yang terbuka mempengaruhi implementasi kebijakan di sebuah organisasi. Salah satu aspek yang penting adalah Standar Operasional Prosedur (SOP), yang memungkinkan para pejabat publik membuat keputusan dengan efisien dan konsisten. Penerapan yang benar terhadap SOP sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan menghindari hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

Fragmentasi juga merupakan aspek penting dalam struktur birokrasi. Pembagian tanggung jawab dan tugas di antara unit-unit organisasional dapat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Pembagian tugas yang jelas dan pemahaman yang baik terhadap bidang kerja masing-masing unit penting untuk memberikan pengarahan yang tepat kepada anggota tim.

Selain itu, kewenangan juga merupakan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Otoritas yang jelas dan terarah memastikan bahwa program dijalankan sesuai dengan yang diharapkan. Kepala Badan BPBD Kota Palangkaraya, sebagai contohnya, memiliki wewenang yang mempengaruhi pemahaman dan kinerja anggota lainnya dalam organisasi.

Dalam keseluruhan implementasi kebijakan, sumber daya seperti staf yang cukup, informasi yang akurat, SOP yang jelas, fragmentasi yang efektif, dan kewenangan yang tepat harus dikelola dengan baik. Hanya dengan memperhatikan dan mengoptimalkan sumber daya ini, implementasi kebijakan dapat berjalan lancar dan efisien.

3.3. Komunikasi

Implementasi kebijakan yang berhasil memerlukan pemahaman yang jelas dan akurat tentang tujuan serta ukuran kebijakan oleh para pelaksana. Penting untuk menyampaikan tujuan dan ukuran kebijakan dengan jelas kepada para implementor dan memastikan konsistensi dalam pengertian dan pengaplikasiannya. Proses komunikasi dalam organisasi dapat menjadi kompleks, dengan informasi yang terbatas pada beberapa pihak atau tersebar secara tidak seragam. Hal ini dapat mengakibatkan interpretasi yang berbeda-beda. Untuk memastikan pelaksanaan keputusan yang efektif, para implementor harus memahami kemampuan dan tanggung jawab mereka terhadap implementasi tersebut. Jika pembuat kebijakan tidak memberikan spesifikasi yang jelas, maka para implementor akan menghadapi kesulitan dalam menjalankan kebijakan tersebut dan mencapai hasil yang optimal. Kurangnya komunikasi yang efektif juga dapat mempengaruhi implementasi kebijakan.

Salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan adalah transmisi yang baik. Sebelum melibatkan masyarakat, penting bagi mereka untuk menyadari bahwa keputusan telah dibuat dan ada perintah untuk mengimplementasikannya. Namun, seringkali terjadi penolakan atau kesalahpahaman terhadap keputusan tersebut. Penolakan terhadap kebijakan dapat menghambat transmisi yang efektif atau menghasilkan distorsi komunikasi karena implementor dapat melakukan diskresi yang tidak sesuai dengan maksud aslinya. Selain itu, faktor seperti tingkat usia dan masa

kerja juga dapat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Implementor yang berusia tua mungkin menghadapi kesulitan dalam memahami standar operasional prosedur (SOP) yang ada.

Kejelasan juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan. Petunjuk implementasi harus diterima dan jelas bagi para implementor. Terkadang, perintah yang ditransmisikan tidak merinci kapan atau bagaimana program harus dilaksanakan. Kurangnya kejelasan memberikan ruang bagi implementor untuk memberikan interpretasi baru terhadap kebijakan tersebut, yang dapat berlawanan dengan maksud sebenarnya. Banyak faktor yang dapat menyebabkan kurangnya kejelasan, seperti kompleksitas kebijakan, ketidakinginan untuk memprovokasi segmen publik tertentu, dan masalah dalam memulai kebijakan baru.

Konsistensi juga menjadi hal yang penting dalam implementasi kebijakan. Aturan implementasi harus konsisten dan jelas agar implementor dapat mempercepat implementasi dengan mudah. Namun, terkadang implementor merasa terbebani dengan petunjuk yang konsisten. Pada bagian ini juga terjadi masalah komunikasi yang dapat mempengaruhi implementasi. Oleh karena itu, penting untuk menjaga konsistensi dalam menyampaikan kebijakan dengan jelas kepada semua anggota, seperti yang dilakukan oleh Sekretaris Badan BPBD Kota Palangkaraya. Dalam hal ini, beberapa contoh SOTK kepegawaian di BPBD kota Palangkaraya disampaikan untuk menjelaskan kebijakan dengan lebih rinci.

Dalam kesimpulannya, implementasi kebijakan yang efektif membutuhkan komunikasi yang jelas, transmisi yang baik, kejelasan petunjuk implementasi, dan konsistensi dalam menyampaikan kebijakan. Semua faktor ini saling terkait dan dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan memahami dan mengatasi rintangan-rintangan yang mungkin terjadi dalam proses implementasi, organisasi dapat meningkatkan efektivitas kerja mereka dan mencapai tujuan kebijakan yang diinginkan.

3.4. Disposisi

Implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh sikap para pelaksana. Jika mereka setuju dengan kebijakan, mereka akan menjalankannya dengan senang hati. Namun, jika pandangan mereka berbeda, proses pelaksanaan akan menghadapi masalah. Terdapat tiga bentuk sikap para pelaksana terhadap kebijakan, yaitu kesadaran, petunjuk, dan intensitas tanggapan. Meskipun mereka mungkin memahami tujuan program, seringkali mereka gagal dalam menjalankan program dengan tepat karena menolak tujuan yang ada. Dukungan dari pejabat pelaksana sangat penting. Dukungan dari pimpinan dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Salah satu bentuk dukungan adalah menempatkan kebijakan sebagai prioritas utama, mempertimbangkan keseimbangan dalam personalia, serta memberikan insentif yang memadai kepada pelaksana program.

Efek disposisi dapat menjadi hambatan serius dalam implementasi kebijakan. Banyak kebijakan diimplementasikan secara tidak meyakinkan karena para pelaksana tidak memiliki perasaan yang kuat terhadapnya. Ketika mereka tidak setuju dengan peraturan, penyimpangan terjadi antara kebijakan dan kinerja. Dalam kasus seperti itu, implementor akan memilih seleksinya sendiri, bahkan dengan cara yang mendiskriminasi untuk menunda implementasi. Penting bagi pimpinan untuk memahami hal ini. Perubahan disposisi implementor dapat dilakukan melalui manipulasi intensif. Dengan meningkatkan keuntungan atau biaya perilaku tertentu, implementor dapat lebih memilih memajukan kepentingan kebijakan.

Staffing birokrasi juga memengaruhi implementasi kebijakan. Jika personalia yang ada tidak mengimplementasikan kebijakan dengan baik, pertimbangkan untuk menggantikannya dengan orang yang lebih responsif. Peningkatan sarana dan prasarana juga diperlukan, seperti alat pencarian korban hilang di hutan. Selain itu, para bawahan harus menjalankan kebijakan dengan baik dan aktif

dalam menyampaikan kekurangan agar efektivitas kerja BPBD dalam penanggulangan bencana terwujud.

Rapat intensif dan contoh yang baik dari pimpinan kepada bawahan dapat meningkatkan mutu dan kualitas serta mengurangi kekurangan dalam implementasi kebijakan pada setiap bidang. Pimpinan harus terus aktif dalam membuat dan memperkuat kebijakan, serta mendengarkan dan menindaklanjuti masukan dari anggota. Dengan demikian, dapat tercapai peningkatan efektivitas implementasi kebijakan di BPBD Kota Palangkaraya, terutama dalam penanggulangan bencana.

3.5. Masalah dan Prospek

Interaksi beberapa faktor seperti komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Dalam hal ini, baik pihak BPBD kota Palangkaraya maupun masyarakat sekitar memiliki peran penting dalam mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan.

Untuk memperbaiki implementasi kebijakan, perlu diidentifikasi dan dianalisis berbagai masalah yang muncul. Meskipun tidak bisa memberikan solusi langsung, namun melalui prospek perbaikan, implementasi kebijakan dapat ditingkatkan. Penting bagi para pembuat keputusan untuk melakukan tindakan dan mengawasi bahwa keputusan dan perintah mereka diimplementasikan dengan baik. Menurut hasil wawancara dengan Kepala Badan BPBD Kota Palangkaraya, harapannya adalah agar BPBD tetap eksis dan maju dalam menghadapi bencana di Kota Palangkaraya dengan melengkapi kekurangan yang ada.

Dalam kesimpulannya, hubungan yang baik antara atasan sebagai ujung tombak pemerintahan dan bawahan serta rekan sesama birokrat memiliki pengaruh signifikan dalam menjadikan suatu daerah lebih maju. Pemimpin yang menjadi inspirasi, penggerak, dan motivator memiliki peran penting dalam mencapai tujuan implementasi kebijakan yang lebih baik.

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan tata kerja dan organisasi akan sangat mempengaruhi pencapaian visi misi organisasi, maka diperlukan implementasi yg baik termasuk pada organisasi perangkat daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang memerlukan tata kerja yang baik guna dapat mengantisipasi bencana dan tidak membahayakan masyarakat. Dalam penelitian penulis menemukan temuan penting yakni Implementasi BPBD Kota Palangkaraya di dalam tata kerja organisasi badan penanggulangan daerah mengacu pada peraturan walikota nomor 60 tahun 2019 kota palangkaraya yang sama halnya dengan temuan amalina dyah purwoningrum yang mana implementasi tata kerja organisasinya mengacu pada peraturan daerahnya sendiri juga yaitu peraturan daerah nomor 03 tahun 2011 kabupaten banjar negara.

Penulis menemukan temuan penting pada dimensi komunikasi di dalam penelitian penulis dimana komunikasi dalam Implementasi tata kerja organisasi badan penanggulangan bencana daerah kota palangkaraya belum cukup baik berbanding terbalik dengan temuan nendy mulyawan nugrahanto yang menemukan komunikasi dalam implementasi perencanaan strategis BPBD Kota Surakarta yang berjalan dengan baik.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa bahwa implementasi tata kerja organisasi BPBD kota Palangkaraya dari lima dimensi yang telah digunakan dapat disimpulkan bahwa pada dimensi disposisi, masalah dan prospek sudah berjalan baik namun masih terdapat kekurangan pada dimensi sumberdaya,

komunikasi dan struktur birokrasi. Dengan demikian implementasi tata kerja BPBD kota Palangkaraya belum berjalan dengan optimal.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Implementasi Tata Kerja Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kota Palangkaraya pada umumnya dan Dinas BPBD beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Amalina Dyah Purwoningrum. (2014), Implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara Dalam Menanggulangi Bencana Tahun 2014.

Hendrik Kristian Rumaseuw. (2022), dengan judul penelitian Implementasi Kebijakan Mitigasi Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bagi Masyarakat Terdampak Banjir Di Kabupaten Supiori Provinsi Papua.

Nendy Mulyawan Nugrahanto. (2019), Implementasi Perencanaan Strategis Badan Penanggulangan Daerah Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menanggulangi Banjir Di Kota Surakarta.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, CV.